

Pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sdm terhadap kualitas LKPD Bandung Barat

JBB
13, 1

Dinda Putri, Nunung Aini Rahmah*

Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

157

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of internal control systems and human resource competencies both partially and simultaneously on the quality of the financial reports of the West Bandung regional government. Which is located in the Regional Work Unit of West Bandung Regency Government. The analytical technique used to determine the sample in this study was a purposive sampling technique, with 31 samples from 31 populations directly related to financial statements. All respondents filled out the research questionnaire online via the Google form. The research results show: (1) The internal control system has a positive and significant effect on the quality of the financial reports of the West Bandung regional government. (2) Competence of human resources has a positive and significant effect on the quality of the West Bandung Regional Government Financial Statements. (3) The internal control system and human resource competencies have an influence both partially and simultaneously on the quality of the West Bandung Regional Government Financial Statements. The implication is that the work unit for the West Bandung regional apparatus in following up and improving the quality of its financial reports by addressing the findings of the Government Finance Agency in the 2021 IHPS Inspection Results Summary, the main focus is on improving the quality of reports Finance is an internal control system and human resources as a basis for future work.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Bandung Barat. Yang berlokasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Teknik analisis yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, dengan 31 sampel dari 31 populasi yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan. Seluruh responden mengisi kuesioner penelitian secara online melalui google form. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Bandung Barat. (2) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandung Barat. (3) Sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandung Barat. Implikasinya, satuan kerja perangkat daerah Bandung Barat dalam menindaklanjuti dan meningkatkan kualitas laporannya dengan mengatasi hasil temuan-temuan Badan Pemerintah Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) IHPS tahun 2021, fokus utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia sebagai dasar dalam bekerja nantinya.

Kata Kunci:

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia

Received 17 April 2023

Revised 17 Juli 2023

Accepted 18 Oktober 2023

JEL Classification:

M40, M54

DOI:

[10.14414/jbb.v13i1.3738](https://doi.org/10.14414/jbb.v13i1.3738)

Journal of
Business and Banking

ISSN 2088-7841

Volume 13 Number 1

May - October 2023

pp. 157-175



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan, laporan integral ini berisi tentang posisi keuangan dan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dalam pelaporan keuangan. Maksud utama dari laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi-informasi mengenai laporan posisi keuangan, saldo anggaran lebih, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berdasarkan kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yakni relevan, andal, dapat di bandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah, 2010).

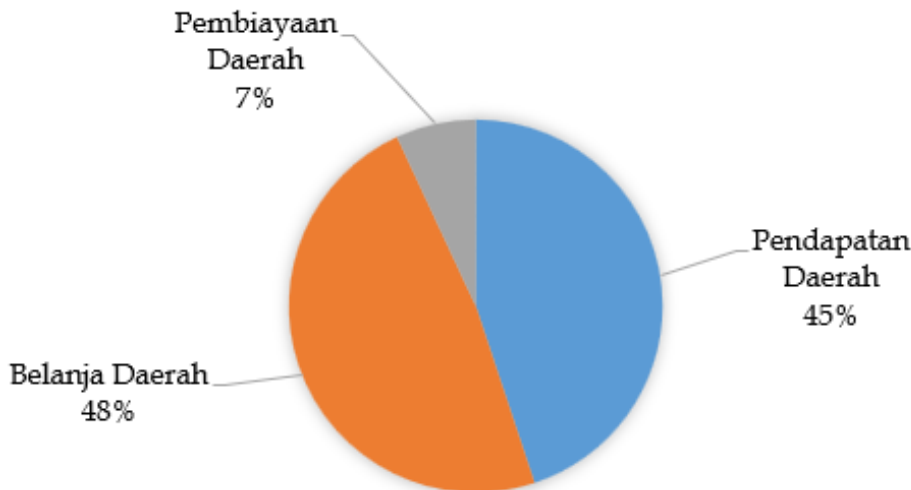
Fenomena yang diangkat pada penelitian ini terjadinya masalah di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang mengalami krisis keuangan atau defisit anggaran pada 2022. Pasalnya, krisis keuangan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berdampak pada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang terancam diberhentikan dan di bayar setengah gaji. Padahal, pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) baru saja mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 lalu, jelas saja permasalahan ini menjadi perhatian publik (Adminbidikekspres, 2022).

Tabel 1, terlihat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada 2021, pemerintah Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hampir tiap tahun mendapatkan opini Wajar Dalam Pengawasan (WDP). Pengamat politik menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari krisis keuangan sampai mengalami defisit anggaran ini adalah pandemi Covid-19. Selain itu, defisit anggaran terjadi karena adanya *refocusing* anggaran serta adanya perencanaan yang kurang matang di pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tidak memiliki *planning* alternatif sejak masa penangkapan Bupati Bandung Barat yang berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang baik. Okeh karena itu, kondisi krisis keuangan tidak dapat diprediksi oleh pemerintah daerah. Gambar 1, adalah diagram pie mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandung Barat pada tahun anggaran 2022.

Tabel 1
Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Bandung Barat Tahun 2017 - 2021

Tahun	Opini
2017	WDP
2018	WDP
2019	WTP
2020	WDP
2021	WTP

Sumber: BPK, 2022



Gambar 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bandung Barat Tahun Anggaran 2022

Sumber: www.bandungbaratkab.go.id

Tabel 2
LHP BPK atas LKPD Bandung Barat Tahun 2017-2021

Tahun	Temuan
2017	16
2018	19
2019	11
2020	22
2021	21

Sumber: BPK, 2022

Pada Gambar 1, terlihat bahwa pendapatan daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan daerah dan belanja daerah. Pasalnya pada 2022 Pemerintah Bandung Barat mendapatkan pendapatan daerah sebesar 45% atau setara dengan Rp. 2,913,958,280,698 rupiah lebih kecil jika dibandingkan dengan pengeluarannya yaitu pada belanja daerah sebesar 48% atau setara dengan Rp. 3,128,129,584,936 rupiah dengan pembiayaan daerah sebesar 7% atau setara dengan Rp. 448,571,304,238 rupiah. Berikut adalah Tabel 2 adalah hasil temuan badan pengawas keuangan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Bandung Barat (Tabel 2).

Pada Tabel 2, terdapat beberapa permasalahan yang masih dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021. Ini meliputi akumulasi penyusutan aset tetap dan aset lainnya yaitu perihal intruksi/perintah untuk mengkaji kebijakan akuntansi yang mengatur penambahan masa manfaat agar tidak melebihi manfaat awal dan kebijakan akuntansi yang melarang/mengatur penambahan masa manfaat. Namun, ini tidak menambah masa manfaat, perihal intruksi/perintah untuk melakukan rekonsiliasi perhitungan penyusutan aset tetap dan aset lainnya. Demikian juga terjadinya kelebihan pembayaran atas belanja modal pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp.3.417.582.485,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Hal ini telah

ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp.1.697.325.464,00. Perihal penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan, terkait penatausahaan persediaan dan penggunaan aplikasi persediaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan perihal Intruksi/perintah agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan persediaan.

Selain itu, menurut hasil wawancara, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, mereka harus segera menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang terjadi pada 2023 ini, yang disebabkan oleh terjadinya krisis keuangan yang di alami pemerintah daerah saat ini. Alasannya, pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih membutuhkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) untuk membantu para pegawai Pegawai Negeri Swasta (PNS). Saat ini, pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mempunyai 3.655 pekerja kontrak yang tersebar di setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD), namun pekerja kontrak ini diperkirakan akan hilang pada tahun 2023 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat juga mengklaim bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih mengalami kekurangan pegawai, kalau yang menjadi acuannya analisis jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Bandung Barat masih kurang. Hal ini jelas saja pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memperbaiki dari segi kualitas sumber dayanya (Kamaludin, 2022a).

Debgan demikian, solusi yang ditempuh oleh pemeritah Kabupaten Bandung Barat untuk mengurangi defisit anggaran pemerintahnya diantaranya dengan melakukan efisiensi dan penganggaran untuk mempertahankan opini Badan Pengawas Keuangan (BPK). Misalnya saja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperbaiki efisiensi anggaran pada setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Kamaludin, 2022b).

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Sistem Pengendalian Internal

Dalam pemerintahan dengan ruang lingkup yang cukup besar dan kompleks, terdapat banyak permasalahan yang cukup rumit, oleh karena itu seorang pemimpin atau kepala daerah yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemerintahan tersebut dapat menanggulangi, melindungi, dan mengawasi keamanan dari berbagai aktivitas perusahaan agar terhindar dari baik kesalahan-kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi ataupun telah terjadi. Cara tersebut di antaranya dengan menerapkan pengendalian internal yang baik dan memadai secara berkelanjutan, karena perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh satuan sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik terhadap kelemahan sistem kerja manusia karena merupakan hal yang sangat penting dalam pengendalian internal.

Menurut COSO (2013) dalam Lathifah (2021) "*Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel,*

designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance". Hal ini menegaskan bahwa, sebaik apapun pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan, hanya dapat memberikan jaminan yang memadai, meskipun dirancang dan disusun sedemikian rupa, tidak dapat sepenuhnya mencapai tujuan. (Lathifah, 2021).

**JBB
13, 1**

Adapun sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal (1) tentang sistem pengendalian internal, menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan tersebut ndicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah , 2008).

161

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi atau entitas yang baik tidak terlepas dari keberhasilan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dengan terciptanya sumber daya manusia, perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan. Salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan adanya sumber daya manusia yang baik yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi pegawai negeri sipil, kompetensi dijelaskan sebagai karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan (Badan Kepegawaian Negara (BKN), 2013). Menurut CIPD (*The Chartered Institute of Personnel and Development*) dalam Wibowo (2020) Sumber daya manusia adalah suatu bentuk perencanaan, pengaplikasian serta pemeliharaan yang bertujuan untuk mengelola manusia (karyawan) supaya mempunyai kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi (Wibowo, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dalam organisasi atau entitas secara profesional, efektif serta efisien diperlukan adanya kompetensi sumber daya manusia sebagai kemampuan dengan segala potensi yang dimilikinya dalam bekerja, sehingga dapat lebih berdaya guna.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, instansi pemerintah harus mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman pada bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang baik. Karena jika sumber daya manusia suatu entitas tersebut kompeten maka akan mampu memahai logika akuntansi dengan baik.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepadanya dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengelola organisasi.

Menurut Indrasari (2019), kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan suatu produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan para pelanggan atau konsumen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang integral mengenai posisi keuangan dan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. (Peraturan Pemerintah, 2010).

Hipotesis

Rahayu (2020) menghubungkan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu kualitas laporan keuangan Pemda bisa dipengaruhi oleh seberapa baik pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin baik pengendalian internal dalam suatu institusi pemerintah, maka akan berdampak juga pada meningkatnya kualitas laporan keuangannya.

Pemerintah yang menerapkan sistem pengendalian internal akan membentuk laporan keuangan yang terstruktur serta sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan diperoleh laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Trisnawati dan Wiratmaja (2018) bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ridzal dkk (2022) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki implikasi penting bagi kualitas pelaporan keuangan. Demikian pula pada penelitian yang dikemukakan oleh Martini dkk (2022), bahwa sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan berdampak pada peningkatan kualitas sistem informasi pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, makin meningkatnya penerapan sistem pengendalian internal, maka makin baik kualitas laporan keuangan.

H1: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Mardiasmo (2022) menghubungkan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu sumber daya manusia yang kompeten bisa menghemat waktu ketika dalam proses menyusun laporan keuangan. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui serta memahami apa yang dikerjakan dengan baik. Oleh sebab itu, laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Pemerintah yang mempunyai sumber daya manusia yang kompeten akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan dan diharapkan pada lingkungan pemerintahan agar bisa bekerja secara terstruktur sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Trisnawati & Wiratmaja (2018) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Rizka dkk (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula pada hasil penelitian Imelia dkk (2021) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan sehingga akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

JBB
13, 1

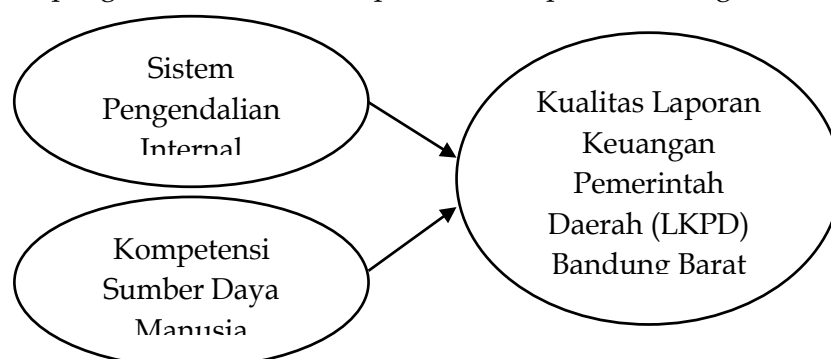
Untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah maka diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia yang kompeten tidak akan berguna jika tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik. Dengan sistem pengendalian internal yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik. Sumber daya manusia yang kompeten tidak akan berguna jika tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik. Selain berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas negara dan sebagai bukti komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah rakyat, juga berfungsi sebagai informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah.

163

Hal di atas didukung oleh hasil penelitian Rahmawati dkk. (2022) Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Imelia et al. (2021) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian Internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Dalam menyelesaikan pelaporan keuangan, diperlukan dukungan yang memadai dari sumber daya manusia, serta pengendalian akuntansi internal. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diberlakukan, oleh karena itu peran aparatur pemerintah khususnya yang ada di daerah akan lebih menentukan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana diuraikan dalam pasal 233 "Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat daerah (Sekda, sekretariat DPRD, direktorat, dinas, badan) harus memenuhi persyaratan kompetensi: teknis, manajerial, dan sosial kultural.

H3: Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.



Gambar 2
Rerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel pada penelitian ini yaitu pegawai yang berkaitan atau paham mengenai laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bandung Barat diantaranya Kepala Badan/Dinas/Instansi, Bagian Keuangan/Bendahara, serta Staff/Pelaksana dengan kriteria responden paham dan tau kondisi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Total sampel yang diambil sebanyak 31 orang dari masing-masing dinas yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Sistem Pengendalian Internal

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sistem pengendalian internal tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu : Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian internal (Pemerintah Pusat, 2008). Variabel ini diukur dengan skala likert dengan ketentuan skor 1 sampai dengan 5 yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Kurang Setuju, 4) Setuju, 5) Sangat Setuju.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi pegawai negeri sipil, yaitu: Pengetahuan; Keterampilan; dan Sikap (Pemerintah Pusat, 2013). Variabel ini diukur dengan skala likert dengan ketentuan skor 1 sampai dengan 5 yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Kurang Setuju, 4) Setuju, 5) Sangat Setuju.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu Relevan; Andal; Dapat dibandingkan; dan Dapat di pahami (Pemerintah Pusat, 2010). Variabel ini diukur dengan skala likert dengan ketentuan skor 1 sampai dengan 5 yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Kurang Setuju, 4) Setuju, 5) Sangat Setuju.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan survei dimana proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menafsirkan data untuk memberikan keadaan yang nyata sehingga hubungan antar variabel dapat dipahami (Sugiyono, 2018). Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis asosiatif dengan hubungan kausal yaitu sebab akibat untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) (Sugiyono, 2018). Dengan metode kuesioner melalui online yaitu *google formulir* yang disebar kesetiap responden yang kemudian diolah menggunakan *Software Microsoft Excel 2016* dan program *Software Statistical for Social Science (SPSS) v25*.

Tabel 3
Karakteristik Responden

JBB
13, 1

Karakteristik	Kategori	f	%
Bagian/Jabatan	Kepala Badan/Dinas/Instansi	8	26
	Bagian Keuangan/Bendahara	14	45
	Staff/Pelaksana	9	29
Jenis Kelamin	Laki-Laki	20	86
	Perempuan	11	14
Usia	20 - 25 Tahun	1	3
	26 - 30 Tahun	5	16
	31 - 35 Tahun	7	23
	> 35 Tahun	18	58
Pendidikan Terakhir	SLTA/Sederajat	1	3
	Diploma (D3)	4	13
	Strata 1 (Sarjana)	22	71
	Strata 2 (Master)	4	13
	Strata 3 (Doktor)	-	-
Masa Bekerja	< 1 Tahun	-	-
	1 - 5 Tahun	7	23
	6 - 10 Tahun	5	16
	> 10 Tahun	19	61

165

Sumber: Data Diolah, 2023

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebar ke seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bandung Barat dengan jumlah responden sebanyak 31 orang.

Berdasarkan Tabel 3, karakteristik bagian/jabatan yang menjadi responden terbanyak yaitu 45% pada bagian keuangan/bendahara, sedangkan 29% pada staff/pelaksana, dan 26% kepala badan/dinas/instansi. Berdasarkan data karakteristik jenis kelamin di atas, mayoritas responden adalah laki-laki 86% dan perempuan 14%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bandung Barat adalah laki-laki.

Berdasarkan data usia responden terbanyak yaitu sebanyak 58% yang berusia > 35 tahun, 23% berusia 31 - 35 tahun, 16% berusia 26 - 30 tahun, dan 3% berusia 20 - 25 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu sebanyak 71% berpendidikan Strata 1 (Sarjana), 13% berpendidikan Diploma (D3), 13% berpendidikan Strata 2 (Master), 3% berpendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, dan 0% berpendidikan Strata 3 (Doktor). Berdasarkan masa bekerja responden, 61% bekerja selama > 10 tahun, 23% bekerja selama 1 - 5 tahun, 16% bekerja selama 6 - 10 tahun, dan 0% bekerja selama <1 Tahun.

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai standar deviasi semua variabel yang diamati dalam interpretasi masing-masing variabel tersebut tidak lebih besar dari rata-rata responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, tidak jauh berbeda pada antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan responden cenderung memberikan persepsi positif terhadap seluruh variabel bebas. Demikian pula dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki perbedaan yang besar.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pernyataan yang terdapat pada kuesioner penelitian bisa memakai uji validitas. Seluruh item yang terdapat pada kuesioner yang mempunyai r hitung $> r$ tabel pada $n = 0,355$ dapat dinyatakan valid. Dalam penelitian ini indeks validitas pada masing-masing item pernyataan variabel sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang diukur melalui nilai korelasi *Product Moment* yang memiliki nilai diatas nilai koefisien valid yakni sebesar 0,355 maka, dengan demikian masing-masing pernyataan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas yang terdapat pada kuesioner dari ketiga variabel yaitu sistem pengendalian internal (X_1) sebesar 0,777, kompetensi sumber daya manusia (X_2) sebesar 0,846, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (Y) sebesar 0,811 menunjukkan nilai *alpha cronbach* lebih besar dari 0,70 hal ini menunjukkan bahwa butir kuesioner pada variabel sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dinyatakan reliabel dan dapat mengukur variabelnya serta dapat dikatakan memiliki ketetapan yang tinggi untuk dijadikan variabel pada suatu penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas *kolmogorov-smirnov* dengan memiliki persamaan *monte carlo* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian hipotesis.

Hasil uji multikolinieritas variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai *VIF* sebesar 2,775 dan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *VIF* sebesar 2,775 maka kedua nilai *VIF* tersebut dibawah batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas. Adapun dari sisi *tolerance* variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,350 dan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,360 maka kedua nilai *tolerance* tersebut lebih dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji heteroskedasitas dalam model tidak terdapat heteroskedasitas karena tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y . hal ini menandakan bahwa dalam model, variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama konstan.

Tabel 4
Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Perhitungan	Keterangan
Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	0,200	Normal
Uji Multikolinieritas <i>Tolerance & VIF</i>	SPI (X1) : <i>Tolerance</i> = 0,360 <i>VIF</i> = 2,775 Kompetensi SDM (X2) : <i>Tolerance</i> = 0,360 <i>VIF</i> = 2,775	<i>Tolerance Value</i> > 0,10 atau <i>VIF</i> < 10 (Tidak terjadi multikolinieritas)
Uji Heteroskedasitas	Tidak terjadi heteroskedasitas	Konstan
Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	DW = 2,094 $du < d < 4 - du$ (1,5701 < 2,094 < 2,4299)	Tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif (terima)

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 5
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2.823	3.028	
SPI	.348	.168	.334
Kompetensi SDM	.546	.156	.567

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil uji autokorelasi pada angka *durbin watson* sebesar 2,094. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan angka *Durbin Watson* (DW) dibandingkan nilai kritisnya (dl dan du), dari tabel *Durbin Watson* (DW) pada n=31 dan k=2, maka diperoleh nilai du=1,5701 dan dl=1,2969. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $du < d < 4 - du$ (1,5701 < 2,094 < 2,4299) artinya tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Bagian Berdasarkan Tabel 5, hasil uji analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,823 + 0,348X_1 + 0,546X_2$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X₁ = Sistem Pengendalian Internal

X₂ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

Persamaan regresi linier diatas memperlihatkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan nilai *constant* adalah 2,823, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel sistem pengendalian internal dan

kompetensi sumber daya manusia (X_1 dan X_2 adalah 0) maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat sebesar 2,823 satuan.

Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal adalah 0,348, artinya jika variabel sistem pengendalian internal (X_1) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2) dan konstanta (a) adalah 0 (nol) maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat meningkat sebesar 0,348 atau setara dengan 34,8%.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal yang disediakan berkontribusi positif yang artinya menunjukkan pengaruh yang terjadi adalah searah bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat, sehingga makin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Bandung Barat maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat.

Nilai koefisien regresi kompetensi SDM adalah 0,546, artinya jika variabel kompetensi SDM (X_2) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel sistem pengendalian internal (X_1) dan konstanta (a) adalah 0 (nol) maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat meningkat sebesar 0,546 atau setara dengan 54,6%.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal yang disediakan berkontribusi positif yang artinya menunjukkan pengaruh yang terjadi adalah searah bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat, sehingga makin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Analisis Koefisien Korelasi

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi menunjukkan hasil perolehan nilai variabel X_1 diperoleh nilai sebesar $r=0,788$ maka dapat disimpulkan nilai koefisien korelasi untuk sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,788 yang artinya korelasi memiliki keeratan yang kuat. Sedangkan hasil perolehan nilai variabel X_2 diperoleh nilai $r=0,834$ maka dapat disimpulkan nilai koefisien korelasi untuk kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,834 yang artinya korelasi memiliki keeratan yang sangat kuat.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien determinasi yang terdapat pada *adjusted r square* sebesar 0,718. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 71,8%. Sisanya 28,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 6
Analisis Koefisien Korelasi

		Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kualitas Laporan Keuangan
SPI	<i>Pearson Correlation</i>	1	.800	.788
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	31	31	31
Kompetensi SDM	<i>Pearson Correlation</i>	.800	1	.834
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	31	31	31
Kualitas Laporan Keuangan	<i>Pearson Correlation</i>	.788	.834	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	31	31	31

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 7
Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.736	.718	2.88491

Sumber: Data Diolah, 2023

Penarikan Kesimpulan

Uji Parsial (*t-Test*)

Berdasarkan Tabel 8, tampak bahwa hasil uji t menunjukkan variabel sistem pengendalian internal (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, hal ini terlihat dari nilai signifikan variabel sistem pengendalian internal (X₁) $0,048 < 0,05$ dan nilai t-hitung lebih besar dari t tabel ($2,066 > 2,04841$), maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga hipotesis yang menunjukkan terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial diterima.

Adapun pada variabel X₂ Berdasarkan hasil uji-t, tampak bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terlihat dari nilai signifikan variabel kompetensi sumber daya manusia (X₂) $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t-tabel ($3,510 > 2,04841$), maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga hipotesis yang menunjukkan terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara parsial diterima.

Tabel 8
Uji Parsial (t-Test)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	2.823	3.028		.932	.359
SPI	.348	.168	.334	2.066	.048
Kompetensi SDM	.546	.156	.567	3.510	.002

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 9
Uji Simultan (f-Test)

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	651.075	2	325.538	39.114	.000 ^b
Residual	233.037	28	8.323		
Total	884.112	30			

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji Simultan (f-Test)

Berdasarkan hasil uji-f, terlihat bahwa pada nilai f hitung sebesar 39,114 dengan nilai f hitung > F tabel atau $39,114 > 3,33$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal (X_1) dan kompetensi sumber daya manusia (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Bandung Barat.

Pembahasan Hasil

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat. Hal ini dapat dijelaskan semakin baik sistem pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik dan. Hal ini dikarenakan Sistem Pengendalian Internal di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bandung Barat telah berjalan dengan efektif dan efisien karena didukung oleh yang pertama lingkungan pengendalian internal yang baik dimana bagian keuangan yang mempunyai integritas dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta bagian keuangan yang menunjukkan komitmen untuk menjadi individu yang lebih kompeten dalam mencapai suatu tujuan. Kedua didukung oleh penilaian risiko yang baik dimana memiliki bagian keuangan yang mampu menganalisis risiko mengenai dampak dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta mampu menganalisis dan mengidentifikasi risiko fraud dalam laporan keuangan. Ketiga didukung oleh kegiatan pengendalian yang baik dengan dimana keuangan yang mampu mengembangkan

kegiatan pengendalian secara umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan serta bagian keuangan yang bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Keempat didukung oleh informasi dan komunikasi yang baik dimana informasi yang disediakan selalu tepat waktu, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif secara tepat dan selalu mengkomunikasikan perihal pengendalian internal kepada pihak eksternal. Kelima didukung oleh pemantauan yang baik dimana dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mencakup indentifikasi kegiatan dan sistem pendukung dalam pencapaian tujuan serta selalu melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan baik.

**JBB
13, 1**

171

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Rahayu (2020), yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan melalui seberapa baik pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah. Dinyatakan bahwa makin baik pengendalian internal dalam suatu institusi pemerintah, makin tinggi kualitas laporan keuangannya (Rahayu, 2020).

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian, juga diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat. Selain itu, ini juga menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bandung Barat telah berjalan dengan efektif dan efisien. Kondisi ini didukung oleh : pertama, pengetahuan yang baik dimana bagian keuangan memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan akuntansi, telah memiliki fungsi dan peran yang jelas dalam pengelolaan laporan keuangan, memiliki pengetahuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar, serta bagian keuangannya perlu melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam meningkatkan jenjang kariernya. Kedua didukung oleh keterampilan yang baik dimana bagian keuangan yang bekerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mendapatkan pelatihan untuk menunjang kemampuan dalam bekerja di bidang akuntansi, mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan, serta pelatihan yang dilakukan oleh bagian keuangan yang dapat membantu dalam penyajian laporan keuangan, ketiga sikap yang baik dimana instansi selalu memberikan apresiasi kepada pegawai yang taat dan selalu mematuhi peraturan ditempat kerja, bagian keuangan yang selalu menyelesaikan laporan keuangan sesuai prosedur dan aturan-aturan yang berlaku, serta bagian keuangan yang menyelesaikan laporan keuangan setiap periode dengan tepat waktu.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2022) yaitu sumber daya manusia yang berkompeten dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik

sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Jadi, makin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka makin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2022).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada SKPD Bandung Barat dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di SKPD Bandung Barat telah berjalan dengan efektif dan efisien. Karena didukung oleh yang pertama laporan keuangan yang relevan dimana laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan yang mengandung informasi yang dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, serta laporan keuangan yang disajikan tepat waktu. Kedua laporan keuangan yang andal dimana laporan keuangan yang disajikan memuat transaksi-transaksi akuntansi yang sebenarnya, laporan keuangan yang disajikan dapat diverifikasi dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (bersifat netral) serta memiliki bukti pendukung, dan laporan keuangan yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material. Ketiga laporan keuangan yang dapat dibandingkan dimana laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, serta laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal. Keempat laporan keuangan dapat dipahami dimana para pengguna laporan keuangan belum memahami standar akuntansi pemerintah, serta laporan keuangan yang disajikan dapat memudahkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dalam menyelesaikan pelaporan keuangan, diperlukan dukungan yang memadai dari sumber daya manusia, serta pengendalian akuntansi internal.

Hasil penelitian ini mendukung undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diberlakukan. Oleh karena itu, peran aparatur pemerintah khususnya yang ada di daerah akan lebih menentukan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Ini berkaitan dengan pasal 233 "Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat daerah (Sekretaris Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), direktorat, dinas, badan) harus memenuhi persyaratan kompetensi: teknis, manajerial, dan sosial kultural".

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Sistem pengendalian internal pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Bandung Barat dalam kategori baik. Oleh sebab itu, kondisi ini berdampak pada kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Bandung Barat menjadi lebih baik. Selain itu, kompetensi sumber daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bandung Barat dalam kategori yang sangat baik juga terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Bandung Barat menjadi lebih baik. Hasil ini memberikan implikasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bandung Barat dalam menin-daklanjuti dan meningkatkan

kualitas laporan keuangannya dengan mengatasi hasil temuan-temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) pada 2021. Oleh sebab itu, diharapkan juga mereka lebih fokus utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia sebagai dasar dalam bekerja nantinya.

**JBB
13, 1**

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tetap mempertahankan opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Bandung Barat yang sudah meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Ini agar mereka dapat meningkatkan sistem pengendalian internal itu sendiri serta memperbaiki efisiensi anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pada Pemda Kabupaten Bandung Barat, sebaiknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bandung Barat perlu melaksanakan pelatihan-platihan ataupun *workshop* khusus secara rutin agar pegawai masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

173

Dalam penelitian ini, terdapat kendala yang dihadapi peneliti terkait dengan pengisian kuesioner, peneliti harus menunggu cukup lama pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan izin agar bisa bertemu langsung dengan para responden penelitian terutama pada bagian keuangan. Hal tersebut tentu karena padatnya kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Bandung Barat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adminbidikekspres. (2022). *Pemkab Bandung Barat Gelar Rakor Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2021*. Bidik Ekspres.Id. <https://bidikekspres.id/2022/06/pemkab-bandung-barat-gelar-rakor-pembahasan-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-bpk-atas-lkpd-ta-2021/>
- Imelia, D., Rahayu, S., & Wiralestari, W. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. In *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 149–163. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.16112>
- Indrasari, M. (2019). *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan* (Cetakan 1). Unitomo Press.
- Kamaludin, H. (2022a). *Kekurangan ASN, Pemda KBB Harus Putar Otak Untuk Menindaklanjuti Penghapusan TTK*. TribunJabar.Id. <https://jabar.tribunnews.com/2022/01/30/kekurangan-asn-pemda-kbb-harus-putar-otak-untuk-menindaklanjuti-penghapusan-ttk>.
- Lathifah, N. (2021). *Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal* (T. A. Marlin & Y. Alhidayah (eds.); Cetakan 1). Insan Cendekia Mandiri. <https://books.google.co.id/books?id=FFEtEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>.

- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.)). Andi. https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true
- Martini, R., Satirah, F. R., Nurhasanah, Ibrahim, K. B. C. S., Rachman, K., & Husin, F. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal. *Eksistensi*, 11(1), 1420-1427.
- Pemerintah Pusat. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pemerintah Pusat. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Pusat. (2013). *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil: Vol. PERKA NO 7*.
- Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Rahayu, D. P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 87-96.
- Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu, A., Kholid, N., Sofyani, H., Akuntansi, D., & Yogyakarta, U. M. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *JRAK*, 12(2), 330-343. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094-3104.
- Rizka, A., Zamzami, & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi). *JAKU(Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)*, 6(3), 136-148.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta CV.

Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 768. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p29>

JBB
13, 1

Wibowo, A. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Prima Agus Teknik.

175

Koresponden Penulis

Penulis 1 dapat dikontak pada e-mail: nunung.aini@lecture.unjani.ac.id